

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Terdapat beberapa teori mengenai pembangunan ekonomi menurut para ahli (Purnamawati, 2023), berikut diantaranya:

1. Teori Pembangunan Rostow

Teori pembangunan yang dipelopori oleh Walt Whitman Rostow, dalam teorinya menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi bisa dibedakan menjadi lima tahap, yaitu:

- a. Tahap Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*)

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara memproduksi yang primitif yang didasarkan pada ilmu pra-Newton dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan tersebut telah turun-temurun. Ciri-ciri masyarakat tradisional adalah produktivitas per kapita yang rendah, sumber daya masyarakat digunakan untuk sektor pertanian dan struktur sosial masyarakat bersifat hierarkis. Meski nuansa politik bersifat sentralistik, namun kekuatan politik ada pada tuan-tuan tanah.

- b. Tahap Prasyarat Tinggal Lepas Landas (*The Preconditions for Take-Off*)

Tahap prasyarat tinggal lepas landas merupakan kondisi dimana ditemukan/ditengarai dari indikasi adanya perubahan dalam masyarakat mencapai

pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*self-sustained growth*). Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis. Ciri-ciri masyarakat ini adalah:

- 1) Penerapan ilmu pengetahuan modern,
- 2) Munculnya *entrepreneur*,
- 3) Kenaikan investasi,
- 4) Perubahan radikal masyarakat dalam ilmu pengetahuan, dan
- 5) Perubahan Teknik produksi dan pengambilan risiko.

Selain itu, peran sektor pertanian memiliki peran penting dengan alasan kemajuan sektor ini akan menjamin pasokan bahan makanan, dan kenaikan sektor pertanian akan memperluas sektor industri. Ciri lainnya adalah terjadinya pembangunan sarana/infrastruktur secara besar-besaran.

c. Tahap Tinggal Lepas Landas (*The Take-Off*)

Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi akan selalu terjadi. Pada awal tahap ini, terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat, seperti revolusi politik, inovasi, terbukanya pasar-pasar baru, serta peningkatan pendapatan nasional yang melebihi pertumbuhan penduduk, sehingga pendapatan per kapita meningkat. Selain itu, kemampuan negara untuk menggali permodalan dalam negeri juga meningkat. Meski demikian, teori ini mendapatkan respon berupa kritik, diantaranya adalah tumpang tindihnya tahapan-tahapan yang ada, periode tahap tinggal lepas landas yang meragukan dan adanya masyarakat yang tidak melalui tahapan tradisional.

d. Tahap Menuju Kedewasaan (*The Drive to Maturity*)

Tahap menuju kedewasaan adalah suatu tahap dimana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Tahapan ini akan terjadi pola pergeseran sektor memimpin digantikan oleh sektor baru yang ditengarai oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, dan kebijakan pemerintah yang mendukung proses peralihan tersebut.

e. Tahap Konsumsi Tinggi (*The Age of High mass-Consumption*)

Pada tahap ini, konsentrasi masyarakat diarahkan pada konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi kepada masalah produksi. Negara yang berbeda pada posisi ini memiliki tiga macam tujuan, yaitu:

- 1) Memperbesar kekuasaan dan pengaruh luar negerinya, sehingga berorientasi pada liberalisme dengan format baru,
- 2) Menciptakan negara kesejahteraan (*welfare state*), dan
- 3) Meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok menjadi meliputi barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah.

2. Teori Pembangunan Arthur Lewis

Teori pembangunan W. Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada (Kuncoro, 1997) mengutip dalam (Huda, 2017).

Mengawali teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Perekonomian Tradisional

Mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya, mengalami surplus tenaga kerja. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya, fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum *law of diminishing return*. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel, dalam hal tenaga kerja justru akan menurunkan total produksi yang ada. Di sisi lain, pengurangan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan di sektor pertanian tidak akan mengurangi tingkat produksi yang ada, akibat proporsi input variabel tenaga kerja yang terlalu besar.

b. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, dimana sektor yang berperan penting yaitu sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dari input yang digunakan termasuk tenaga kerja. Industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan hal ini akan berusaha dipenuhi oleh penduduk pedesaan dengan jalan urbanisasi. Perbedaan tingkat upah di kota dengan di pedesaan merupakan daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

3. Teori Pembangunan Malthus

Teori Thomas Robert Malthus dalam bukunya berpendapat bahwa proses pembangunan tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Menurutnya, proses pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dari naik turunnya perekonomian. Proses akumulasi modal merupakan salah satu faktor penting terhadap proses pembangunan ekonomi (Jhinghan 2012) mengutip dalam (Febriyanda, 2022).

Demikian Malthus menyampaikan beberapa saran untuk proses pembangunan yaitu sebagai berikut:

- 1) Terciptanya pertumbuhan yang seimbang diberbagai sektor ekonomi.
- 2) Pendistribusian kesejahteraan dan kepemilikan atas tanah secara adil.
- 3) Melakukan perluasan perdagangan baik perdagangan internal maupun perdagangan eksternal.

2.1.2 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Pada dasarnya ketimpangan biasanya disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Hal ini sudah lumrah terjadi, pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah serta berimplikasi terhadap perumusan kebijakan pembangunan wilayah oleh pemerintah daerah (Sjafrizal, 2008).

2.1.2.1 Teori Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Menurut Para Ahli

Terdapat beberapa teori yang berhubungan dengan ketimpangan pembangunan, yaitu :

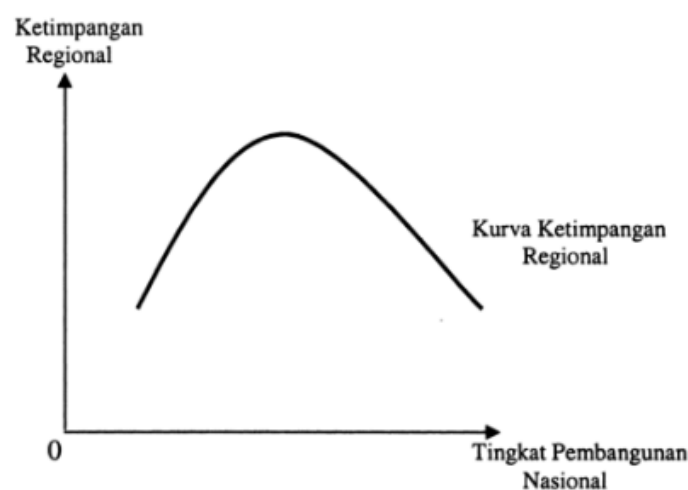
1) Hipotesa Neo-Klasik

Permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah pertama kali dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan Neo-Klasik yang dikenal dengan Hipotesa Neo-Klasik. Menurut hipotesa Neo-Klasik pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Bila proses pembangunan terus berlanjut, maka ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut akan menurun secara berangur-angsur. Berdasarkan hipotesis dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa pada negara-negara berkembang ketimpangan pembangunan akan cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk “U terbalik” (*Reverse U-shape Curve*).

Kebenaran hipotesa Neo-Klasik ini kemudian diuji oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data time series dan cross section. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik yang diformulasikan secara teoritis ternyata terbukti secara empirik. Artinya bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap awal justru terjadi hal sebaliknya (Sjafrizal, 2008).

Hipotesis Kuznets pertama kali diajukan oleh Simon Kuznets pada tahun 1955. Teori ini menyatakan bahwa hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan

ekonomi mengikuti pola kurva berbentuk U terbalik. Menurut Kuznets, pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan akan cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, namun hanya pada titik tertentu, ketimpangan akan mulai menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi (Liana et al., 2024). Dengan demikian kurva ketimpangan pembangunan berbentuk huruf “U terbalik” seperti lonceng.



Sumber : (Sjafrizal, 2008)

Gambar 2. 1 Grafik Hipotesa Neo-Klasik

2) Teori Keterbelakangan dan Pembangunan

Myrdal menciptakan teori keterbelakangan dan pembangunan ekonomi pada tahun 1957. Untuk menjelaskan teori ini Myrdal menggunakan *spread effect* dan *backwash effect* sebagai pengaruh penyebaran dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Spread effect* (dampak besar) diartikan sebagai suatu pengaruh yang mendatangkan keuntungan (*favourable effect*), efek ini akan membuat aliran kegiatan ekonomi di pusat pertumbuhan menyebar ke daerah terbelakang. *Backwash effect* (dampak balik) diartikan sebagai pengaruh yang mendatangkan

kerugian (*infavourable effect*) efek ini akan membuat daerah pusat menyerap segala kegiatan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi hanya berfokus pada daerah pusat. Daerah yang memiliki *backwash effect* yang lebih besar akan berpotensi memiliki ketimpangan pembangunan antar wilayah (Febriyanda, 2022).

3) Teori *Trickling Down Effect*

Tricking Down Effect merupakan suatu perkembangan meluasnya pembagian pendapatan yang dikemukakan oleh Hirschman (1958), adalah seorang pelopor teori pertumbuhan yang tidak seimbang. Secara geografis, pertumbuhan ekonomi pasti tidak seimbang, dimana kemajuan dorongan-dorongan tempat (titik) menimbulkan tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan dan dorongan-dorongan ke arah perkembangan pada tempat-tempat berikutnya. *Trickling down effect* mengharapkan kegiatan ekonomi yang lebih besar dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi dibawahnya memiliki lingkup yang lebih kecil. Namun, pada kenyataannya teori ini sulit berjalan sebagai mana mestinya, justru terjadi *trickle up effect* (muncrat ke atas). Akibatnya pembagian pembangunan semakin dinikmati oleh kalangan atas. Teori *trickling down effect* yang diterapkan di wilayah negara berkembang masih belum berhasil untuk memecahkan masalah pengangguran, kemiskinan dan pembagian pendapatan yang tidak merata baik dalam negara berkembang maupun antara negara maju dengan negara berkembang (Witari & Saidi, 2023).

2.1.2.2 Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Menurut Sjafrizal (2008) terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan atau memicu terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah tersebut, antara lain :

1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada suatu daerah. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif lebih murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya lebih rendah. Kondisi akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih sedikit hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya relatif tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi ini akan menyebabkan daerah cenderung mempunyai pertumbuhan lebih lambat.

2. Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografis akan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang dapat mendorong penyediaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, kondisi demografis yang kurang baik akan menyebabkan relatif rendah produktivitas kerja masyarakat

setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah akan menjadi lebih rendah.

3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik transmigrasi atau migrasi spontan. Apabila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah yang terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Hal ini akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Sebaliknya, apabila konsentrasi ekonomi pada suatu daerah relatif rendah. Ini akan mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat. Konsentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. Kedua, meratanya fasilitas transportasi. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Kondisi ini akan mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Demikian sebaliknya, apabila investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah ternyata lebih rendah akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.3 Ukuran Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

a. Indeks Williamson

Indeks Williamson yang dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1965. Williamson mengemukakan model V_w (indeks tertimbang atau *weighted index* terhadap jumlah penduduk) dan V_{uw} (tidak tertimbang atau *un-weighted index*) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu. Dikarenakan variasi jumlah penduduk di setiap wilayah berbeda-beda, maka model ketimpangan tertimbang menjadi lebih relevan. Maka dari itu, penjelasan mengenai kecenderungan meningkat atau menurunnya ketimpangan dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan besarnya pembagi dari penduduk daerah tersebut (Wahidin et al., 2022). Berikut adalah formulasi dari indeks Williamson:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f}{n}\right)}}{y} \quad 0 < V_w < 1$$

Keterangan :

V_w = indeks Williamson

y_i = PDRB per kapita ADHK pada daerah i

y = PDRB per kapita ADHK rata-rata seluruh daerah

f_i = jumlah penduduk di daerah i

n = jumlah penduduk seluruh daerah

Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < V_w < 1$. Jika nilai V_w semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika nilai V_w semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produksi atau pendapatan per kapita suatu negara. Produksi biasanya diukur dengan produk nasional bruto (GNP) atau pendapatan nasional bruto (GNI). GNP atau GNI merupakan total output suatu perekonomian dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pencapaian output dari waktu ke waktu yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

Menurut Barron dan Martin (2004:5) dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara maka dapat digunakan untuk menganalisis kinerja perekonomian suatu negara dibandingkan dengan perekonomian negara lainnya. Suatu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menunjukkan kemajuan ekonomi negara tersebut. Sebaliknya, negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah mencerminkan keterbatasan

kemampuan perekonomian suatu negara dalam menghasilkan output dalam perekonomian (Frisdiantara & Mukhlis, 2016).

Dalam hal ini, Todaro menyebutkan tiga faktor utama yang dapat mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain:

- a. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia (*human resource*).
- b. Perkembangan penduduk dalam arti peningkatan tenaga kerja baik kuantitas maupun kualitas.
- c. Kemajuan teknologi sebagai produk baru yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Secara umum perkembangan teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli diantaranya yakni:

1) Teori Harrod Domar

Teori pertumbuhan Harrod Domar merupakan pemikiran pertumbuhan ekonomi klasik. Teori Harrod Domar merupakan pengembangan dari teori ekonomi makro Keynes terkait dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut Harrod Domar pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi pembentukan modal tersebut dapat diperoleh dari akumulasi tabungan yang dilakukan oleh penduduk sehingga bermanfaat bagi kegiatan investasi.

2) Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert Solow (1956) dan pengikutnya didominasi oleh pemikiran mengenai pertumbuhan pendapatan per

kapita jangka panjang dan perkembangan yang semakin meningkat. Teori Solow memfokuskan pada proses pembentukan modal. Menurutnya, tingkat tabungan merupakan tambahan pembiayaan terhadap stok modal nasional. Dalam teori ini tidak hanya didasarkan pada peranan tenaga kerja seperti pada teori Harrod Domar, tetapi stok modal dan perkembangan tingkat kemajuan teknologi merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi.

2.1.4 Tipologi Daerah

Untuk mengidentifikasi daerah tertinggal terdapat model yang paling populer yang dikenalkan oleh Leo Klassen 1965 dan Netherlands Economic Institute. Klassen menganggap daerah sebagai mikrokosmos yang diskrit, yaitu daerah ekonomi yang dapat dipahami melalui studi tentang besaran-besaran ekonominya. Klassen mengajukan suatu teknik sederhana yaitu dengan membandingkan tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan suatu daerah tertentu dengan tingkat dan laju pertumbuhan penduduk.

Pendekatan tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal (Darma, 2013). Tipologi Klassen menghasilkan empat klasifikasi kondisi ekonomi dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut:

Tipologi Klassen		Pendapatan perkapita	
		$y_i > y$	$y_i < y$
Laju Pertumbuhan	$r_i > r$	Daerah maju dan tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat
	$r_i < r$	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Sumber: Sjafrizal, 2008 dalam (Indriyani, 2024)

Gambar 2. 2 Klasifikasi Tipologi Klassen

Keterangan:

r_i : Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah i

r : Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh daerah i

y_i : Nilai rata-rata pendapatan per kapita daerah i

y : Nilai rata-rata pendapatan per kapita seluruh daerah i

Dari gambar 2.2 di atas berikut penjelasan dari masing-masing karakteristik pertumbuhan ekonomi yaitu:

- Kuadran I daerah maju dan tumbuh cepat (*high income and high growth*) adalah daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan.
- Kuadran II daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi namun tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dari rata-rata. Pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik.

- c. Kuadran III daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata.
- d. Kuadran IV daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang rendah.

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. (Wahyu Dhyatmika, 2013). PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. Data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan) (Keuangan, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik perhitungan PDRB terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan diantaranya:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah tertentu pada periode tertentu (biasanya satu tahun). Nilai tambah merupakan hasil pengurangan output dengan input. Unit-unit produksi dikelompokkan menjadi sembilan lapangan usaha (sektor). PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam sembilan sektor:

- a. Pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan)
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Listrik gas dan air bersih
- e. Kontruksi
- f. Perdagangan, hotel dan restoran
- g. Pengangkutan dan komunikasi
- h. Keuangan persewaan dan jasa perusahaan
- i. Jasa-jasa lainnya

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan

keuntungan (balas jasa kewiraswastaan), semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup penyusutan dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan stok dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Dengan kata lain, PDRB merupakan jumlah dari empat kelompok pengeluaran yaitu konsumsi, investasi, pembelian pemerintah dan ekspor neto (Mankiw, 2007) mengutip dalam (Rama Nurhuda, 2013).

2.1.6 Kependudukan

2.1.5.1 Pengertian Jumlah Penduduk

Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 2, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu (Bidarti, 2020). Penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (Said 2001) dalam (Nursetianingrum, 2018).

Partisipasi penduduk dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan kebijaksanaan dalam meningkatkan efektivitas keputusan perencanaan pembangunan ekonomi sehingga proses pembangunan dalam suatu daerah dapat dicapai sesuai sasaran. Namun dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah dua, ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan ada juga yang menganggap sebagai pemacu pembangunan. Pada umumnya perkembangan penduduk di negara berkembang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Masalah jumlah penduduk dapat menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

2.1.5.2 Teori Kependudukan Menurut Para Ahli

Adapun terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai kependudukan atau populasi yang dikutip dalam (Bidarti, 2020), diantaranya yaitu:

1) Aliran Malthusian

Thomas Robert Malthus adalah seorang pelopor pertama yang mengemukakan tentang penduduk dalam karyanya "*Essay on Population*". Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, pada kasusnya terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang, hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan.

Teori Malthus menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut

deret hitung. Teori Malthus sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun, karena beban manusia semakin banyak. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit, dan kematian.

Menurut pendapatnya, faktor pencegah dari ketidakseimbangan penduduk dan manusia antara lain *preventif checks* (penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin), *positive checks* (bencana alam, wabah penyakit, kejahatan dan peperangan). Robert Malthus mengemukakan beberapa pendapat tentang kependudukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi.
- b. Manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat (deret hitung) dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (deret ukur).

2) Aliran Marxist

Yang dipelopori oleh Karl Marx dan Frederick Hegel tidak sependapat dengan Malthus. Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah

tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis). Marxist berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, sehingga tidak perlu diadakan pembatasan penduduk.

Dasar pegangan Marxist adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beda pandangan Marxist dan Malthus adalah pada “*natural resource*” tidak bisa dikembangkan atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Berikut adalah beberapa pendapat aliran Marxist yaitu:

- a. Populasi manusia tidak menekan makanan, tetapi mempengaruhi kesempatan kerja.
- b. Kemeralatan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh.
- c. Semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktivitasnya, jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya, artinya Marxist menolak teori Malthus tentang moral *restraint* untuk menekan angka kelahiran.

3) Aliran Neo-Malthusian

Pada abad 20 teori Malthus mulai diperdebatkan kembali. Kelompok ini menyokong aliran Malthus, akan tetapi lebih radikal lagi dan aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan cara-cara “*preventif check*” yaitu menggunakan alat kontrasepsi.

Tahun 1871 Ehrlich menulis buku “*The Population Bomb*” dan kemudian direvisi menjadi “*The Population Explotion*” yang berisi:

- a. Sudah terlalu banyak manusia di bumi ini,
- b. Keadaan bahan makanan sangat terbatas,
- c. Lingkungan rusak sebab populasi manusia meningkat.

Analisis ini dilengkapi oleh Meadow, melalui buku “*The Limit to Growth*” ia menarik hubungan anatara variabel lingkungan (penduduk, produksi pertanian, produksi industri, sumber daya alam) dan populasi. Namun, malapetaka tidak dapat dihindari, hanya manusia cuma menunggunya, dan membatasi pertumbuhannya sambil mengelola alam dengan baik. Kritikan terhadap Meadow umumnya dilakukan oleh sosilog yang menyindir Meadow karena tidak mencantumkan variabel sosial-budaya dalam penelitiannya.

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) bahwa pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan yang seharusnya dianalisis serta dapat dipahami dari sudut manusianya bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (*Human Development Report*, 2008: 103) sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia (Suriadi, 2019), diantaranya adalah :

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.

- b. Pembangunan dimaksudkan tersebut untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- c. Pembangunan manusia memfokuskan perhatiannya bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

Menurut Badan Pusat Statistik, IPM merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990 UNDP membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan. Indeks ini terbentuk dari rata-rata skor capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas dan Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Semakin besar indeks pembangunan manusia di suatu daerah maka dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup manusianya. Dengan kata lain, kebijakan ekonomi di

daerah tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup warganya (Keuangan, 2018). Kategori IPM berdasarkan UNDP dikelompokkan menjadi empat kategori, diantaranya :

- a. *Very high HDI*: untuk nilai IPM 0,800
- b. *High HDI*: 0,700 nilai IPM < 0,800
- c. *Medium HDI*: 0,550 nilai IPM 0,700
- d. *Low HDI*: nilai IPM < 0,550

Adapun batas minimum dan maksimum indeks masing-masing komponen IPM sebagai berikut,

Tabel 2. 1 Batas Minimum dan Maksimum Komponen IPM

No	Komponen IPM	Minimum	Maksimum
1.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	25	85
2.	Angka Melek Huruf (Persen)	0	100
3.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	0	15
4.	Daya Beli (Rupiah PPP)	300.000	732.720 (1996)

Sumber: UNDP dalam (Suriadi, 2019)

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari beberapa peneliti yang telah dilakukan oleh sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mengenai “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023”.

Berikut hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini akan diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rini Raharti, Titi Laras, Oktavianti, 2021, Model Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia	Pertumbuhan ekonomi, Jumlah penduduk	IPM, lokasi penelitian, analisis regresi data panel, Indeks Williamson, Tipologi Klassen, Hipotesis Kuznets	Bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan.	Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis, Volume 12, Nomor 2, Juli 2021, P-ISSN 2089-1989 E-ISSN 2614-1523, Hal. 257-270
2.	Kurniati Mansyur, Nursini, Hamrullah, 2021, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	Pertumbuhan ekonomi, analisis Indeks Williamson	Jumlah penduduk, IPM, lokasi penelitian, Analisis regresi data panel, tipologi Klassen, Hipotesis Kuznets	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Pengeluaran pemerintah dapat memberikan pengaruh yang bermakna dengan rendahnya ketimpangan pembangunan	Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 1 Issue 2, December 2021, Page 79-107
3.	Cindilina T. Gabriel, Een N. Walewangko, Dennij Mandeij, 2021, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM	Pertumbuhan ekonomi, IPM	Jumlah penduduk, lokasi penelitian, Analisis regresi data panel, indeks Williamson,	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan, IPM berpengaruh negatif dan signifikan,	Jurnal berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 21, No. 7, Desember

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Industri Pengolahan Sektor Perikanan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kota Belitung Tahun 2002-2020		Tipologi Klassen, Hipotesis Kuznets	industri sektor perikanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.	2021, Hal. 127-137
4.	Anin Nabail Azim, Hady Sutjipto, Rah Adi Fahmi Ginanjar, 2022, Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia	IPM, Alat analisis indeks Williamson, regresi data panel	Jumlah penduduk, Pertumbuhan ekonomi, Lokasi penelitian, analisis indeks Williamson, Tipologi Klassen, Hipotesis Kuznets	IPM berpengaruh negatif dan signifikan, infrastruktur jalan berpengaruh positif dan tidak signifikan, PMDN berpengaruh negatif dan tidak signifikan, PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.	RIE: Jurnal Riset Ilmu Ekonomi, Vol 2 (1) 2022, Hal. 1-16
5.	Rohman Anugrah Sulisty, 2017, Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta	IPM, jumlah penduduk, alat analisis regresi data panel	Pertumbuhan ekonomi, lokasi penelitian, analisis Indeks Williamson, Tipologi Klassen, Hipotesis Kuznets	Variabel IPM berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan ekonomi, variabel PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan ekonomi, variabel UMK berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan ekonomi, variabel JP berpengaruh signifikan dan	Skripsi jurusan Ilmu Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				negatif terhadap ketimpangan ekonomi.	
6.	I Ketut Patra Afriansyah, Hapid, 2022, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kota Palopo	Pertumbuhan ekonomi, analisis indeks Williamson	Jumlah penduduk, IPM, Lokasi penelitian, analisis regresi data panel, tipologi Klassen, Hipotesis Kuznets	Tidak terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan.	Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 4 No. 2, September 2022. ISSN 2655-6944. Page 192-201
7.	Bustam Anggun Pamiati, Nenik Woyanti, 2021, Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK dan IPM Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Kawasan Barlingmascakeb 2013-2019	Populasi, pertumbuhan ekonomi, IPM, alat analisis regresi data panel, tipologi Klassen, indeks Williamson	Lokasi penelitian, Hipotesis Kuznets	Variabel Populasi terdapat pengaruh positif dan signifikan, Variabel pertumbuhan ekonomi terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan, TPAK terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan, IPM berpengaruh negatif dan signifikan.	BISECER (Business Economic Entrepreneurship) Vol. 4 No. 1, Januari 2021 P-ISSN: 2599-3097 E-ISSN: 2714-9986 Page 18-28
8.	Feni Nursetianingrum, 2018, Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, & Dana Alokasi Bantuan Pembangunan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Jumlah penduduk, analisis Indeks Williamson	IPM, Pertumbuhan ekonomi, lokasi penelitian, analisis regresi data panel, tipologi Klassen, hipotesis Kuznets	Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan. Tenaga kerja berpengaruh dengan arah negatif dan signifikan. Dana Alokasi Bantuan Pembangunan berpengaruh signifikan.	Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tahun 2012-2016				
9.	Miftahul Hairatul Jannah, 2022, Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020	Pertumbuhan ekonomi, IPM, analisis indeks Williamson, regresi data panel, lokasi penelitian	Jumlah penduduk, tipologi Klassen, hipotesis Kuznets	Varibel TPT tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi, variabel pertumbuhan ekonomi dan PAD berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi dan variabel jumlah penduduk miskin, IPM dan DAU berpengaruh secara positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020.	Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
10.	Susanti Harahap, Darwis Harahap, Zulaika Matondang, 2022, Determinan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Provinsi Sumatera Utara	Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, IPM, analisis indeks Williamson	Lokasi penelitian, analisis regresi data panel, tipologi Klassen, hipotesis Kuznets	Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan, jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pembangunan, IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan.	PROFJES Volume 01 Edisi 02 Desember 2022 page 167-183

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Aditya Pratama, 2023, Pengaruh IPM, PMA, PMDN Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur	IPM, alat analisis indeks Williamson, analisis regresi data panel	Jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, lokasi penelitian, analisis tipologi Klassen, hipotesis Kuznets	Variabel IPM, PMA dan PMDN berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan sedangkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.	Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
12.	Rama Nurhuda, 2019, Analisis Ketimpangan Pembangunan di Jawa Timur	PDRB per kapita, IPM, alat analisis indeks Williamson, hipotesis Kuznets	Jumlah penduduk, lokasi penelitian, analisis regresi data panel, tipologi klassen	Variabel PDRB per kapita, PAD, DAU, IPM tidak lolos dari uji asumsi klasik.	Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
13.	Yuki Angelia, 2010, Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 1995-2008	PDRB per kapita, analisis indeks Williamson, hipotesis Kuznets	Jumlah penduduk, IPM, lokasi penelitian, analisis regresi data panel, tipologi Klassen	Variabel PDRB per kapita dan aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan, variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan variabel dummy desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan.	Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Univesitas Diponegoro
14.	Riski Doni Damara, Madnasir, Nurhayati, 2024, Analisis Faktor-	Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, analisis	IPM, lokasi penelitian, analisis indeks Williamson, Tipologi	Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan,	OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 4, No. 3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan pada 34 Provinsi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Tahun Periode 2019-2023)	regresi data panel	Klassen, Hipotesis Kuznets	investasi tidak berdampak signifikan, variabel populasi berdampak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.	September 2024 e-ISSN: 2962-4010; p-ISSN: 2962-4444, Hal 310-323
15.	Rini Raharti, Titi Laras, Oktavianti, 2019, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, PAD, IPM dan UMK Terhadap Ketimpangan di Provinsi Banten	Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, IPM	Lokasi penelitian, analisis indeks Williamson, regresi data panel, tipologi Klassen, hipotesis Kuznets	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, jumlah penduduk, PAD berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan IPM dan UMK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan.	JIE: Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol 3, No. 2, May 2019, Pp. 293-300
16.	Siti Badriyah, 2018, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2014	PDRB per kapita, alat analisis indeks williamson, regresi data panel	IPM, lokasi penelitian, analisis tipologi Klassen, Hipotesis Kuznets	Variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan. Variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif signifikan. Sedangkan variabel jumlah pendidikan dan fasilitas kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan.	Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
17.	Luthfian Riza Sanjaya,	IPM, analisis indeks	Jumlah penduduk,	RHGU negatif dan signifikan,	TATA LOKA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Endriatmo Soetarto, Andrea Emma Pravitasari, 2019, Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Kalimantan Tengah (Kajian Pada Kabupaten Kotawaringin Timur Dan Pemekarannya)	Williamson, regresi data panel	Pertumbuhan ekonomi, lokasi penelitian, analisis tipologi Klassen, hipotesis Kuznets	IPK positif dan signifikan, KP negatif dan tidak signifikan, PRDBP negatif dan tidak signifikan, PMIS negatif dan tidak signifikan, PEND positif dan signifikan, PAD negatif dan tidak signifikan, IPM negatif dan signifikan.	Volume 21 Nomor 2, Mei 2019, 253-266, P ISSN 0852- 7458- E ISSN 2356- 0266
18.	Gracetyani Ovicha Naibaho, Juliana Ruth Mandei, Lyndon Reinhard Jacob Pangemanan, 2020, Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	analisis indeks Williamson, tipologi klassen	Jumlah penduduk, IPM, Pertumbuhan ekonomi, Lokasi penelitian, analisis regresi data panel, hipotesis Kuznets	Ketimpangan pembangunanny a menunjukkan ketidakmerataan rendah dengan rata-rata angka Indeks Williamson 0,49 ($< 0,5$).	Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685- 063X, Terakreditasi Jurnal Nasional Sinta 5, Volume 16 Nomor 3, September 2020 369 – 378
19.	Rizal Syaifudin, Aprilia Dwi Verliana, Sugeng Setyadi, Deris Desmawan, 2022, Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Klasifikasi Wilayah antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020	Alat analisis indeks Williamson, tipologi klassen	Jumlah penduduk, IPM, Pertumbuhan ekonomi, Lokasi penelitian, analisis regresi data panel, hipotesis Kuznets	Ketimpangan pembangunan masih tergolong tinggi. Tipologi Klasen bahwa sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Barat termasuk dalam golongan Daerah Berkembang.	Journal of Business and Economics Research (JBE) Vol 3, No 2, June 2022, pp. 117–124 ISSN 2716- 4128
20.	Aperire Thalaha, Intan Fetriana Amara, Deris Desmawan,	Alat analisis indeks williamson,	Jumlah penduduk, IPM, Pertumbuhan	Tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi pada	Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2022, Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Klasifikasi Wilayah antar kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020	tipologi klassen	ekonomi, Lokasi penelitian, analisis regresi data panel, hipotesis Kuznets	Kabupaten/ Kota di Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2020 tergolong cukup tinggi. Daerah berkembang merupakan hasil sebagian besar dari Tipologi Klasen pada Kabupaten/Kota di DKI Jakarta.	Vol. 2, No. 2 April 2022 Page 481-490 E-ISSN: 2774-4221

2.2 Kerangka Pemikiran

Ketimpangan pembangunan di Indonesia banyak terjadi di beberapa daerah, salah satunya pada penelitian ini yaitu ketimpangan yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi NTB pada tahun 2018-2023. Pada dasarnya pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi di suatu daerah tertentu.

Pembangunan suatu wilayah bergantung pada ketersediaan sumber daya, dengan adanya keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap wilayah, ini dapat menjadi penyebab dalam penghambat pembangunan ekonomi. Atau bahkan ada kemungkinan terjadi ketimpangan distribusi pembangunan seperti fokus pembangunan hanya terpusat pada satu wilayah tertentu, sementara wilayah lainnya kurang mendapat perhatian.

Untuk mengukur ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota Provinsi NTB digunakan analisis indeks Williamson yang kemudian dilakukan pembuktian melalui hipotesis kurva Kuznets, kemudian dilakukan pengklasifikasian melalui analisis tipologi Klassen untuk melihat pola pertumbuhan ekonomi. Selain itu,

adapun hubungan dari setiap variabel bebas terhadap ketimpangan pembangunan sebagai berikut.

2.2.1 Hubungan Jumlah Penduduk (X_1) dengan Ketimpangan Pembangunan (Y)

Pertumbuhan jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah dapat dipandang sebagai aset modal dasar pembangunan atau bahkan sebagai penghambat pembangunan. Hal ini dapat menjadi masalah bagi suatu daerah jika peningkatan jumlah penduduk yang dialami suatu daerah yang tidak sejalan dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan akan dapat menghambat pembangunan ekonomi. Akan tetapi, jika pertumbuhan penduduk yang besar diikuti dengan tingkat produktivitas yang tinggi akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dimungkinkan apabila pertumbuhan penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah jika dalam penanganannya belum bisa dilakukan dengan efektif. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Susanti Haraphap, Darwis Haraphap & Zulaika Matondang (2022) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan. Artinya ketika terjadi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan berdampak pada meningkatnya ketimpangan pembangunan.

2.2.2 Hubungan IPM (X_2) dengan Ketimpangan Pembangunan (Y)

Begitupun dengan IPM, IPM secara khusus untuk mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan beberapa komponen dasar kualitas hidup. Nilai IPM pada suatu daerah akan menunjukkan seberapa jauh wilayah

tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan meliputi dari angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat, dan tingkat pengeluaran serta konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak.

Oleh karena itu, ketika nilai IPM disuatu wilayah tinggi maka tingkat pembangunan manusia di wilayah tersebut juga akan meningkat, sehingga ini akan meningkatkan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tingginya IPM maka menandakan daerah tersebut maju, dengan nilai IPM yang tinggi dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Hal ini didukung oleh penelitian Bustam Anggun Pamiati & Nenik Woyanti (2021) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan, setiap peningkatan IPM akan berdampak pada penurunan angka ketimpangan pembangunan.

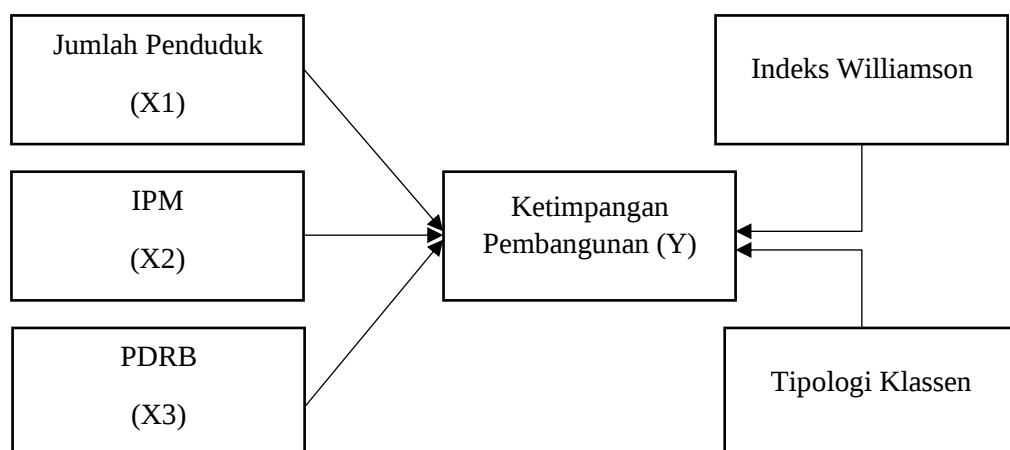
2.2.3 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_3) dengan Ketimpangan Pembangunan (Y)

Tujuan pembangunan ekonomi suatu wilayah pada hakekatnya untuk meningkatkan kesejahteraan wilayah yang bersangkutan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan meningkatkan PDRB pada suatu wilayah. PDRB mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam periode tertentu.

Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang tinggi (PDRB meningkat) seharusnya membawa manfaat bagi semua lapisan

masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa pertumbuhan ekonomi sering kali tidak merata, sehingga memperlebar kesenjangan. Hal ini menjadi penyebab munculnya wilayah yang maju dan wilayah terbelakang. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Kurniati Mansyur, Nursini & Hamrullah (2021) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan kerangka berfikir dalam skema berikut ini:



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang penelitian, teori penelitian dan kerangka pemikiran yang telah dibahas sebelumnya. Penelitian ini memuat hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga bahwa jumlah penduduk dan PDRB secara parsial berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023. Sedangkan, diduga bahwa IPM

secara parsial berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023

2. Diduga bahwa jumlah penduduk, IPM dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023.